



Analisis Penyebab dan Konsekuensi Investasi di Indonesia Pasca Reformasi

Durratul Hikmah Fatus Solikhah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

drarahf@gmail.com

Angga Dwi Permadi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

anggapermadi076@gmail.com

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yasin@untag-sby.ac.id

Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Abstract. *Investment activity is considered one of the important factors to influence the economy. Investment has a positive relationship with state income. To achieve this economic growth, sources of financing are urgently needed to encourage the business world, one of which is through investment realization. There are many investment challenges that are crucial in efforts to increase economic growth and the process of recovering from the economic crisis in Indonesia. Analyzing the data in this study using a qualitative descriptive method, namely a research method with the data obtained is then arranged and described in such a way and systematically. The achievement of all goals must be based on the understanding that full economic recovery can only be achieved if there is improvement in all sectors of the Indonesian economy. Economic reform activities should not be limited to macroeconomic reforms.*

Keywords: *Investment, Economic Growth, Post-Reform.*

Abstrak. Kegiatan investasi dianggap salah satu faktor penting untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Banyak tantangan investasi yang sangat krusial dalam usaha-usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan sedemikian rupa dan sistematis. Pencapaian semua tujuan harus didasarkan pada pemahaman bahwa pemulihan ekonomi secara utuh hanya dapat dicapai jika terjadi perbaikan di semua sektor perekonomian Indonesia. Kegiatan reformasi ekonomi tidak boleh terbatas pada reformasi ekonomi makro.

Received Maret 30, 2023; Revised April 22, 2023; Accepted Mei 30, 2023

* Durratul Hikmah Fatus Solikhah, drarahf@gmail.com

Kata kunci: Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pasca Reformasi.

LATAR BELAKANG

Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod-Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga akan rendah. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengembangkan teori yang sangat melegenda bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal dapat dilihat sebagai pengeluaran yang meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang, atau sebagai pengeluaran yang meningkatkan permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "Engine Of Growth". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Selain itu, Harrod-Domar menekankan bahwa setiap perekonomian harus mengalokasikan persentase tertentu dari pendapatan nasional untuk menggantikan barang modal yang rusak (bangunan, peralatan, material) sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga membutuhkan investasi baru sebagai persediaan modal (Todaro, 2006). Melalui studi kasus perekonomian negara maju, teori Harrod-Domard menarik kesimpulan bahwa investasi memiliki multiplier effect jangka panjang. Di satu sisi, investasi mempengaruhi perkembangan produksi nasional suatu negara, karena ketersediaan modal merupakan faktor penting bagi kelangsungan perkembangan dunia usaha. Di sisi lain, investasi mempengaruhi permintaan agregat. Oleh karena itu, pertumbuhan yang stabil atau pertumbuhan ekonomi yang stabil membutuhkan ekspektasi dan prospek yang stabil bagi para pelaku usaha.

Kegiatan investasi dianggap salah satu faktor penting untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Lalu, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi

juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode peninjauan dari suatu gagasan usaha/bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Dimana, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai

Investasi merupakan suatu aktivitas menyimpan atau menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya agar nilai aset yang lebih besar dibandingkan saat awal menanamkan sehingga mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Pada Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Dimana kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di hari yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Dimana, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. .

KAJIAN TEORITIS

Teori Motivasi FDI

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi langsung (direct investment) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (investor asing). Sedangkan, investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing (Didit&Indah, 2005: 26-47). Terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (debt) dimana pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah secara bilateral maupun multilateral. Kedua adalah penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dimana FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara, berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, joint ventura. Ketiga adalah investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal (Didit&Indah, 2005 : 26-47).

Terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (debt) dimana pinjaman luar negeri dilakukan oleh pemerintah secara bilateral maupun multilateral. Kedua adalah penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dimana FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara, berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, joint ventura. Ketiga adalah investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal (Didit&Indah, 2005 : 26-47).

Penelitian Sebelumnya

Studi Khasanah & Kurniawan (2005) secara khusus menganalisis faktor-faktor penentu investasi asing langsung dalam memilih lokasi industri manufaktur di tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Faktor-faktor penentu tersebut adalah faktor tenaga kerja, faktor pasar, faktor efek aglomerasi, infrastruktur, waktu dan heterogenitas regional. Dalam penelitian ini terlihat bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan lokasi FDI adalah

variabel dummy metropolitan, perpajakan, dana kredit domestik, dan market size serta faktor ketersediaan tenaga kerja. Namun faktor yang berhubungan dengan pasar menjadi faktor utama bagi FDI untuk menentukan lokasinya (market seeker).

Studi Shaukat Ali dan Wei Guo (2005) menggunakan metode survei terhadap 22 industri di China. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keputusan investor di China antar lain market size, growth, nilai tukar, pengembalian investasi, kebijakan insentif pemerintah, stabilitas politik, strategi global dari perusahaan, ekspor, teknologi & infrastruktur. Kesimpulan dari studi ini adalah market size merupakan faktor utama FDI khususnya perusahaan US. Penemuan lainnya adalah strategi global merupakan alasan berinvestasi di China..

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (Library Research). Menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan data yang diperoleh kemudian disusun dan diuraikan sedemikian rupa dan sistematis. Sumber-sumber yang digunakan berasal dari literatur yang dikumpulkan melalui website, jurnal berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini untuk digunakan sebagai data. yang mencakup tentang publikasi data maupun dokumen perusahaan yang dapat dilihat dalam bentuk digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Investasi Indonesia Pra Reformasi

Ketika krisis moneter melanda perekonomian di tahun 1997, meskipun Indonesia telah merdeka selama 52 tahun, negara ini baru mengalami pembangunan yang cukup signifikan sekitar 30 tahun, yaitu selama era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selama pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno, proses pembangunan dan kegiatan investasi agak terbengkalai sehingga kondisi perekonomian negara memburuk. Era pembangunan dan investasi dimulai ketika Soeharto secara formal menjalankan tugasnya pada Maret 1968. Pemerintahan Orde Baru, melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun (Repelita), sukses membangkitkan perekonomian negeri kita yang terpuruk. Masalah-masalah ekonomi yang diwariskan pemerintahan Orde Lama, seperti tingkat inflasi yang sangat tinggi, budget deficit, kemiskinan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan hutang luar negeri yang sangat besar, segera diberikan perhatian. Pemerintahan Soeharto berusaha memodernisasi Indonesia, yang tak banyak berkembang sejak ditinggalkan Belanda. Untuk itu, pemerintahan ini mengundang

negara-negara Barat untuk berinvestasi. Satu kebijakan yang ditempuh adalah meluncurkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967 PMA), yang membiarkan investor asing menggunakan sumber-sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia, memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk menyewa tenaga kerja asing, dan mengizinkan investor asing untuk mentransfer keuntungan ke negara asal mereka setiap saat. Pencapaian ekonomi Orde Baru langsung berbalik arah. Pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 7 persen per tahun pada tahun 1990an tak dapat dipertahankan, dengan jatuhnya pertumbuhan ke tingkat 4,7 persen pada 1997. Kuatnya krisis bahkan memaksa perekonomian berkontraksi sebesar 13,2 persen pada 1998. Krisis multidimensi ini juga menyebabkan terjadinya capital outflows yang besar dari perekonomian, karena para investor tidak yakin atas masa depan kegiatan investasi mereka di Indonesia.

B. Kondisi Investasi Indonesia Pasca Reformasi

Delapan tahun setelah krisis mata uang, banyak hal yang berubah di Indonesia. Orde Baru telah menjadi salah satu korban krisis ketika rezim digulingkan oleh gerakan sosial yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami tiga pergantian kekuasaan tertinggi. Pemerintah-pemerintah ini berusaha menghidupkan kembali perekonomian Indonesia dan berusaha membawa perubahan di bidang sosial, politik, dan hukum ke arah yang lebih baik melalui rencana pembangunan mereka. Di era Reformasi ini, beberapa kemajuan telah dicapai di bidang-bidang ini, tetapi segudang masalah tetap menjadi beban dan beralih dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Pemerintahan SBY-Kalla bukannya tanpa masalah. Hal ini terlihat dari pemulihan ekonomi yang belum dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Fenomena yang dikenal sebagai jobless recovery ini merupakan tantangan besar yang harus dipecahkan pemerintahan SBY-Kalla. Selama periode pemulihan krisis, jobless recovery utamanya terjadi di sektor-sektor perekonomian formal. Sebagai akibatnya, pada 2003 terdapat sekitar 9,5 juta²⁴ penganggur terbuka Indonesia. Pemerintahan SBY-Kalla menargetkan tingkat pengangguran akan turun dari 9,5 persen pada 2003 ke 6,7 persen pada 2009. Pemerintahan ini juga mengharapkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan dari 16,6 persen pada 2004 ke 8,2 persen pada 2009. Untuk mewujudkan targettarget itu, pemerintahan SBY-Kalla harus mampu untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi dari 4,2 persen pada 2003 menjadi 7,6 persen pada 2009, sehingga dalam lima tahun masa kekuasaannya pemerintahan ini dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun itu hanya dapat diwujudkan bila rasio investasi terhadap GDP

dapat ditingkatkan dari 20,5 persen pada 2004 ke 27,4 persen pada tahun terakhir masa pemerintahan SBY-Kalla, 2009.25 Pencapaian semua tujuan tersebut harus didasarkan pada pemahaman bahwa pemulihan ekonomi secara utuh hanya dapat dicapai jika terjadi perbaikan di semua sektor perekonomian Indonesia.

Kegiatan reformasi ekonomi tidak boleh terbatas pada reformasi ekonomi makro. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, ekonomi mikro kita juga harus direformasi. Reformasi di kedua sektor ekonomi tersebut harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Di bidang ekonomi mikro, pemerintahan SBY-Kalla menghadapi banyak kendala dari pemangku kepentingan di sektor tersebut. Mereka mencoba untuk menjaga keuntungan yang sudah mereka nikmati dari tangan mereka. Pemangku kepentingan ini dapat merupakan kombinasi 4 dari pengusaha dan pejabat pemerintah. Di sinilah keberanian dan keteguhan pemerintahan SBYKalla melawan para rent seeker ini diuji. Untuk merehabilitasi perekonomian Indonesia, pemerintahan SBY-Kalla harus mampu menarik investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk kembali menanamkan uangnya di perekonomian kita. Para investor potensial harus dapat diyakinkan bahwa berinvestasi di negeri ini akan mendatangkan peluang-peluang keuntungan (profit opportunities) yang cukup tinggi. Oleh karenanya, agar iklim investasi di Indonesia menarik bagi para investor untuk kembali melakukan berbagai aktivitas bisnisnya, ada beberapa hal yang patut diperhatikan

C. Penyebab Adanya Investasi Di Indonesia Pasca Reformasi

Pada perubahan kepemimpinan presiden mulai B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono merubah semua system perekonomian dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan peluang investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, investasi di Indonesia dapat mngalami pasca reformasi karena beberapa penyebab yaitu :

- Keterbukaan : berbagai fenomena social dan pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi telah dapat diketahui dan dapat diakses oleh semua pihak. Bahkan pemerintah telah menerbitkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dengan melihat hal ini maka reformasi telah memenuhi harapan akan keterbukaan informasi namun nampaknya ada kejanggalan dimana informasi yang bergerak bebas banyak menimbulkan efek negative seperti berita yang beredar terkadang menjadi alat provokasi yang menimbulkan efek konflik vertical maupun horisontal. Yang paling mencengangkan adalah informasi

transaksi politik, transaksi menjadi pegawai, transaksi untuk menduduki jabatan di pemerintahan bahkan transaksi untuk penyelesaian kasus hukum begitu terbuka tidak malu-malu bahkan seakan bangga akan kewenangan yang dimiliki dan kesewenang-wenangan yang dilakukannya. Di sisi lain informasi dan data yang menyesatkan bebas berkeliaran di mana mana seperti data pornografi dan penyebaran budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran .

- Peningkatan partisipasi / peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan : era reformasi telah membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mengusulkan sesuatu, untuk ikut serta dalam aktifitas pemerintahan dan untuk ikut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Bila melihat ini sudah tentu secara sepintas era reformasi telah memberikan ruang bagi public, namun bila kita melihat lebih cermat dan mendalam akan dijumpai fenomena janggal seperti : perencanaan usulan anggaran seperti milik public namun karena usulan itu dibahas di ruang tertutup akhirnya usulan yang masuk harus ada yang membawa ke dalam ruang itu dan hal ini menjadi transaksi menarik sebagaimana kasus di Badan Anggaran DPR yang muncul heboh dipermukaan. Memang masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan namun berapa banyak campur tangan pihak diluar eksekutif yang mengintervensi eksekutif sehingga eksekutif terbelenggu dan semakin banyak orang yang ikut “ cari makan “ dari proses pelaksanaan program pemerintah terutama melalui proyek proyek tertentu. Lebih parah lagi seakan siapaun bisa terlibat di posisi pemerintahan tanpa melihat kompetensinya. Dalam hal pengawasan seakan semua orang bisa mengawasi bahkan tanpa kutip semakin banyak yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi tertentu mengawasi jalannya pemerintahan dengan tujuan tertentu pula.
- Penegakan hukum sebagai wujud adanya keadilan dan kesamaan hak warga Negara di depan hukum : memang hukum semakin ramai dibicarakan bahkan aturan hukum semakin banyak ditetapkan sampai dengan ramainya payung hukum tentang pornografi dan belum ada yang terpidana karenanya. Sementara itu apakah setelah banyak koruptor yang tertangkap itu berarti hukum semakin tegak atau karena hukum tidak bisa menimbulkan kesadaran untuk menghormati hukum. Namun anehnya aturan datang silih berganti aturan satu

dibuat lalu dibatalkan MK aturan satu belum berjalan efektif sudah muncul aturan baru yang merevisinya. Samapai sampai era ini kita bisa pesan aturan dan catatan tertentu.

- Keadilan dalam kesejahteraan sebagai tuntutan manusiawi sehingga warga masyarakat dapat memiliki harkat dan martabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus dikui bahwa semenjak reformasi dinamikasi ekonomi global menyeruak ke berbagai negara investasi seiring jalannya agenda “ titipan IMF “ tentang good governance dan reformasi ekonomi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata – rata diatas 6 ,5 % dan semakin banyak orang membeli kendaraan dan property meskipun “ kredit “ dan semakin orang konsumtif sehingga sumber daya yang ada dialam “ diperkosa dan dirampok “ seperti halnya sumber daya hutan. Memang semakin banyak program subsidi untuk rakyat baik Jamkesmas, Raskin, BIT, PNPM. Memang biaya pendidikan “ katanya disubsidi dan bahkan digratiskan “ namun nyatanya pendidikan semakin mahal biayanya dengan berbagai alasan seperti kelas khusus atau RSBI.
- Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan good government. Agenda ini benar-benar ditunggu masyarakat dimana dengan target utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan menekan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pantas disyukuri pelayanan di berbagai pemda dengan penerapan IT semakin cepat mudah dan murah seperti KTP dan KK namun masih banyak layanan masyarakat yang di institusi tertentu yang masih mahal dan sulit untuk dirubah karena kuatnya institusi tersebut. Untuk layanan energy dan informasi serta infrastruktur semakin berkualitas, adapun yang masih menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan pemberantasan Korupsi sedemikian daruratnya maka dibentuk Komisi khusus untuk pemberantasan korupsi. Namun ibarat pepatah “ mati satu tumbuh seribu “ dimana pelaku koruptor masih banyak yang beraksi secara terang-terangan , samar – samar maupun sembunyi sembunyi.

D. Konsekuensi dari Investasi Di Indonesia Pasca Reformasi

Risiko investasi merupakan potensi kerugian yang dapat dialami investor dari aktivitas investasi tersebut. Risiko ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis (unsystematic risk).

1. Risiko Investasi Sistematis (Systematic Risk) ini adalah risiko eksternal yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini mempengaruhi semua sekuritas dan tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko sistemik meliputi:
 - Risiko suku bunga, yaitu risiko investasi yang mempengaruhi hasil investasi akibat fluktuasi suku bunga
 - Risiko inflasi; disebut juga sebagai risiko daya beli, artinya nilai arus kas investasi masa depan dapat menurun karena perubahan daya beli yang disebabkan oleh inflasi
 - Risiko nilai tukar mata uang (valas): risiko investasi yang terjadi karena perubahan nilai tukar mata uang asing, misalnya ketika mata uang domestik melemah
 - Risiko komoditas; risiko investasi yang timbul akibat perubahan harga komoditas tertentu, biasanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga serta penawaran dan permintaan
2. Risiko Investasi Tidak Sistematis (Unsystematic Risk) Ini adalah risiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Risiko investasi ini dapat diatasi dengan membentuk portofolio atau melakukan diversifikasi investasi. Ini termasuk risiko yang tidak sistematis, yaitu:
 - Risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul akibat kesulitan dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu
 - Risiko reinvestasi: risiko pendapatan dari aset keuangan yang memerlukan reinvestasi oleh bisnis
 - Risiko keuangan, risiko yang berkaitan dengan struktur pendanaan
 - Risiko Komersial, risiko yang terkait dengan bisnis perusahaan investor

Dengan ini, Pemerintah menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10% pada akhir tahun 2014. Target itu bisa tercapai asalkan setiap tahunnya perekonomian meningkat 30% lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Untuk mendorongnya, pemerintah harus fokus pada tiga hal yaitu ekspor, investasi pemerintah dan publik, serta konsumsi. Di samping itu, investasi yang dikembangkan pun harus lebih memihak pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 6,3-6,4% pemerintah menargetkan pertumbuhan laju investasi sebesar 10% pada tahun 2011. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan

perkiraan realisasinya pada tahun 2010 yang sebesar 8%. Membaiknya likuiditas keuangan global akan semakin mendorong masuknya aliran modal dari luar negeri sehingga menggerakkan kinerja investasi domestik dan daya saing perekonomian nasional. Kebutuhan investasi nominal tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp2.243,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebut akan bersumber dari PMA dan PMDN sebesar 26,8%, kredit perbankan 17,4%, pasar modal 16,7%, belanja modal pemerintah 12,4%, dan sumber-sumber investasi lainnya

Solusi yang dapat diambil sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia untuk saat ini dalam upaya Meningkatkan Investasi yaitu, Menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64 persen. Melakukan perbaikan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Sehingga perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi repelita seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku-pelaku ekonomi. Sebenarnya ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satunya yang paling santer adalah peresmian tol Manado - Bitung yang akan semakin menyuburkan prospek investasi serta pariwisata di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM. Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Bisa dikatakan, fokus pemerintah Indonesia sendiri bukan hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju di tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada era pasca reformasi saat Sby Kalla menjabat, banyak tantangan investasi yang sangat krusial dalam usaha-usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan proses pemulihan krisis ekonomi di Indonesia. Pengalaman beberapa tahun belakangan ini memperlihatkan pemulihan perekonomian yang hanya ditopang sektor konsumsi ternyata tak membawa penciptaan lapangan kerja yang memadai. Pemecahan masalah pengangguran harus dilakukan pemerintahan SBY-Kalla secara hati-hati dan menyeluruh. Target pemerintah yaitu mengurangi tingkat kemiskinan guna memperbaiki pertumbuhan ekonomian dan diiringi dengan meningkatkan rasio investasi terhadap GDP.

Pencapaian semua tujuan tersebut harus didasarkan pada pemahaman bahwa pemulihan ekonomi secara utuh hanya dapat dicapai jika terjadi perbaikan di semua sektor perekonomian Indonesia. Kegiatan reformasi ekonomi tidak boleh terbatas pada reformasi ekonomi makro. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, ekonomi mikro kita juga harus direformasi. Pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), pembentukan satgas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM..

DAFTAR REFERENSI

- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. *Centre For Strategic And International Studies*, 1-18.
- Atmadja, A. (1999). Inflasi di Indonesia Sumber-sumber penyebab dan Pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 1-14.
- Ginting , B. (2008). Kepastian Hukum dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Investas di Indonesia . *Universitas Sumatera Utara Medan*, 6-15.
- Harijono, G. S., & Utama , I. S. (2010). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1-20.
- Hernawati , R., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum dalam hukum investasi di indonesia melalui omnibus law. *Jurnal Ilmiah MEA* , 1-17.
- Kurniawan , C. (2020). Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. 1-9.
- Movanita , A. N. (2018, November 26). *Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari masa ke masa*. Retrieved from <https://jeo.kompas.com/amp/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>

- Oktaviana , C. (2014). Dampak Investasi Asing LAngsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .
- Pakpahan, K. (2003). Strategi Investasi di pasar modal. *The Winners*.
- Poersoro, A. W. (2005). Membangkitkan Investasi Di Indonesia. *The Ndongesian Institute* , 1-41.
- Puspitaningtyas, Z. (2015). Prediksi Risiko Investasi. *Universitas Jember*.
- Raya, B. (2022, Juli 21). Retrieved Mei 25, 2023, from <https://bankraya.co.id/articles/insight/detail/berbagai-macam-risiko-investasi-yang-perlu-kamu-tahu>
- Solikahan, E. Z., Ratnawati, K., & Djawahir, A. H. (2013). Pengaruh leverage dan investasi terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen* , 2-6.
- Sudirman , L. (n.d.). Iklim Investasi Di Indonesia . 1-3.
- Zaenuddin, M. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi. *JEJAK*, 3-5.